

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dijelaskan lebih mendalam tentang teori-teori yang mejadi dasar dari pokok permasalahan yang diamati selain itu akan dikemukakan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang akan di teliti.

2.1 Kemiskinan

2.1.1 Garis Kemiskinan BPS

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makan dan bukan makan (BPS, 1994). Untuk kebutuhan minum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari. Sedang pengeluaran kebutuhan minuman bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa.

BPS menggunakan dua macam pendekatan, yaitu: pendekatan kebutuhan dasar (*Basic Needs Approach*) dan pendekatan *Head Count Index*. Pendekatan yang pertama merupakan pendekatan yang sering digunakan. Dalam metode BPS, kemiskinan di anggap sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan *Head Count Index* merupakan ukuran yang menggunakan kemiskinan absolut.

Penggunaan pendekatan kebutuhan dasar (*Basic Needs Approach*) mempunyai tiga kelemahan utama. Kuncoro (2006) menyatakan bahwa kelemahan pertama berkaitan dengan konsep, dimana kemiskinan di anggap sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dan diukur hanya dari sisi

pengeluaran per kapita. Kelemahan kedua, dari segi metodologi pengukuran standar kebutuhan minimum. Metode BPS dikritik karena kurang memperhatikan garis kemiskinan antar daerah perkotaan dan perdesaan yang digunakan dalam metode BPS kurang merepresentasikan perbedaan biaya hidup riil antar daerah perkotaan dan perdesaan. Permasalahan yang ketiga, masih adanya perdebatan tentang pengukuran nilai standar minimum. Apakah pengukurannya harus didasarkan pada harga-harga yang sebenarnya dibayar oleh penduduk miskin ataukah harga-harga yang sebenarnya dibayar oleh penduduk yang hidup sedikit.

2.2.1 Jenis Kemiskinan

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan Dimensi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers memberikan penjelasan mengenai bentuk persoalan dalam kemiskinan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi yang disebut memiskinkan. Konsep kemiskinan tersebut memperluas pandangan ilmu sosial terhadap kemiskinan yang tidak hanya sekedar kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhankebutuhan pokok, akan tetapi juga kondisi ketidakberdayaan sebagai akibat rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan, rendahnya perlakuan hukum, kerentanan terhadap tindak kejahatan (kriminal), resiko mendapatkan perlakuan negatif secara politik, dan terutama ketidakberdayaan dalam meningkatkan kualitas kesejahteraannya sendiri. Berdasarkan kondisi kemiskinan yang

dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki 4 bentuk. Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah Suryawati (2004) adalah:

1) Kemiskinan Absolut

kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan atau mendefinisikan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin.

2) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerah daerah yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.

3) Kemiskinan Kultural

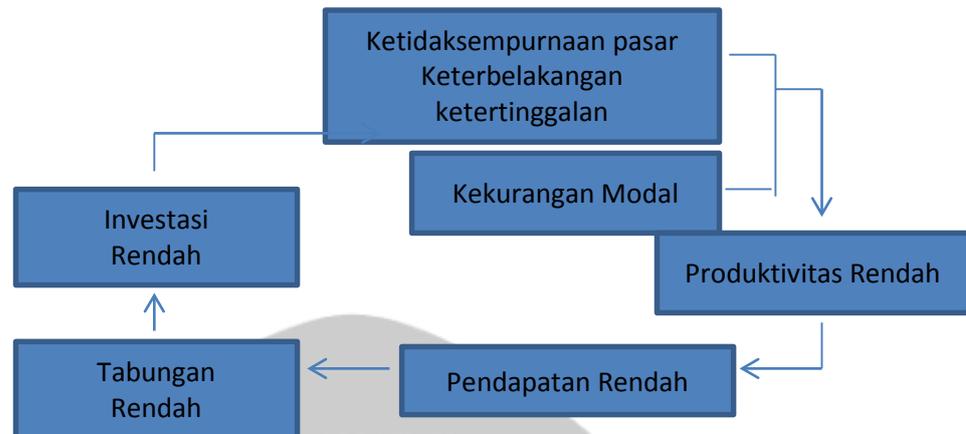
Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara moderen. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.

4) Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif.

2.2.2 Penyebab Kemiskinan

Sharp, *et.al.* (2000: 173-191) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.



Sumber: Mudrajat Kuncoro Edisi ke Empat (2006)

Gambar 1.1
Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*Vicious Circle Of Proverty*). Adanya keterbelakangan, ketidaktepurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada tabungan dan investasi. Apabila tabungan dan investasi rendah maka negara tidak memiliki atau kekurangan modal, sehingga pembangunan tidak akan memadai dan menyebabkan kemiskinan tidak berkurang dan kemungkinan kemiskinan akan bertambah.

Biasanya faktor-faktor yang menjadi penyebab kemiskinan meliputi faktor ekonomi, faktor sosial, faktor struktural (politik), dll. Kemiskinan identik dengan negara yang sedang berkembang, di mana permasalahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mengakibatkan negara sedang berkembang sulit untuk maju. Menurut Todaro dan Smith (2006), kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang diakibatkan karena interaksi antara 6 karakteristik berikut yaitu:

- 1) Tingkat pendapatan nasional di negara berkembang terbelah rendah dan laju pertumbuhan ekonominya tergolong lambat.
- 2) Pendapatan per kapita di negara berkembang juga masih rendah dan pertumbuhannya amat sangat lambat, bahkan ada beberapa yang mengalami stagnasi.
- 3) Distribusi pendapatan amat sangat timpang atau sangat tidak merata.
- 4) Mayoritas penduduk di negara berkembang harus hidup dibawah tekanan kemiskinan absolut.
- 5) Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, kekurangan gizi dan banyaknya wabah penyakit sehingga tingkat kematian bayi di negara-negara berkembang sepuluh kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di negara maju.
- 6) Fasilitas pendidikan di kebanyakan negara-negara berkembang maupun isi kurikulumnya relatif masih kurang relevan dan kurang memadai untuk pelajar di Indonesia.

2.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan

2.1.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia (IPM) diperkenalkan oleh UNDP (*United National Development programme*) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan HRD (*Human Development report*). IPM menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil

pembangunan dalam memperoleh, kesehatan, dan pendidikan. Menurut UNDP, pembangunan manusia dirumuskan sebagai perluasan pilihan bagi penduduk yang dapat dilihat sebagai proses upaya kearah “perluasan pilihan” dan sekalian sebagai tarap yang dicapai dari upaya tersebut. sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan dua dimensi dasar yaitu:

- a) Dimensi umur panjang dan sehat
- b) Dimensi pengetahuan

Kedua dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor, untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup, selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.

2.1.3 Hubungan Antara Variabel Penelitian

2.1.3.1 Hubungan antara IPM dan Tingkat Kemiskinan

Kualitas pembangunan manusia menjadi hal yang sangat penting dalam strategi kebijakan nasional untuk pembangunan ekonomi. Penekanan terhadap kualitas pembangunan manusia menjadi suatu kebutuhan karena sumber daya yang unggul akan menghasilkan seluruh tatanan kehidupan yang maju diberbagai bidang sosial, ekonomi, lingkungan sehingga manusia memiliki andil besar dalam menentukan keberhasilan pengolahan pembangunan wilayahnya.

Untuk mengukur kualitas pembangunan manusia dapat di lihat dari capaian angka IPM. Angka ipm terdiri dari tiga komponen yaitu kesahatan, pendidikan dan kualitas hidup layak, jadi setiap daerah yang memiliki angka IPM

yang mendekati angka 100 maka pembangunan manusia yang ada di daerah tersebut semakin baik, sedangkan daerah yang memiliki angka ipm yang mendekati nol maka daerah tersebut memiliki pembangunan manusia yang buruk. Adapun kategori tersebut sebagai berikut (BPS, 2018):

- a) Tinggi :IPM lebih dari 80,0
- b) Menengah :IPM antara 66,0-79,9
- c) Menengah bawah :IPM antara 50,0-65,9
- d) Rendah : IPM kurang dari 50,0

Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin, dengan rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk, produktivitas yang rendah selanjutnya akan berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan, selanjutnya dengan rendahnya pendapatan akan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin. Menurut Todaro (2006:436-438), modal manusia (pendidikan dan kesehatan) berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan, peningkatan kesehatan dan pendidikan dapat membantu keluarga untuk keluar dari jebakan lingkaran setan kemiskinan, karena dengan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, produktivitas dan pendapatan yang lebih tinggi akan lebih mudah dicapai.

Menurut Susiati (2012: 24), kemampuan untuk keluar dari kemiskinan di tentukan oleh kualitas sumber daya manusia, apabila kualitas sumber daya manusia tinggi, yang tercermin dari tingkat pendidikan dan kesehatan yang tinggi akan menyebabkan produktivitas yang tinggi sehingga tingkat pendapatan pun

menjadi meningkat, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan tingkat pendapatan yang tinggi juga akan tercermin pada IPM yang tinggi, oleh karena itu upaya meningkatkan kualitas pembangunan manusia baik dari aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi terus dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

2.2 Studi Terkait

Putri dan Yuliarmi (2013) meneliti mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran secara simultan dan parsial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali periode 2007 sampai 2011. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan tingkat pengangguran secara parsial berpengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Safuridar dan Putri (2019) melakukan penelitian tentang pengaruh pembangunan manusia, pengangguran dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Aceh bagian timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data indeks pembangunan manusia, pengangguran dan jumlah penduduk, serta data mengenai tingkat kemiskinan pada periode 2008-2017. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda, uji t, uji

f dan analisis koefisien determinasi. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan secara parsial pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan.

Bintang dan Woyanti (2018), melakukan penelitian tentang “Pengaruh PDRB, Pendidikan, Kesehatan dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah (2011-2015). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di 35 Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2011 sampai 2015. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi 35 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah berdasarkan data cross section dan dari 2011 sampai dengan 2015 pada data time series. Metode analisis dari penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM) atau Least Square Dummy Variable (LSDV). Cross section dummy diperlukan karena perbedaan karakteristik dan sumber daya pada masing-masing Kabupaten dan Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Tingkat rata-rata lama sekolah dan tingkat harapan hidup memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Di sisi lain, tingkat pengangguran memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Kotambunan, Palar dan Tumilaan (2016) melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh belanja modal dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di provinsi Sulawesi utara. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh belanja modal dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di provinsi Sulawesi utara. Hasil penelitian ini menunjukkan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, kemudian indeks

pembangunan manusia mempunyai pengaruh negative dan signifikan terhadap kemiskinan.

